KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bahasa Prancis diajarkan di sekolah Indonesia, apakah sudah tepat?
Tanggal : Rabu, 03 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Bahasa Prancis Diajarkan Di Sekolah Indonesia, Apakah Sudah Tepat?

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar mata pelajaran Bahasa Prancis diajarkan di seluruh sekolah di Indonesia. Ia menilai pelajaran Bahasa Prancis penting sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi perkembangan global.

Instruksi Prabowo itu mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang mendukung, namun ada pula yang menolak.

Dalam pidatonya di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026), Prabowo mengatakan, hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada fase yang sangat baik dan perlu diperluas, termasuk di bidang pendidikan, sains, dan teknologi.

"Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyampaikan, kebijakan penerapan Bahasa Prancis, termasuk Bahasa Portugis, di sekolah-sekolah seperti yang pernah diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, tengah dibahas di internal Kemendikdasmen.

Ia menyebut Prabowo juga akan memanggil Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk merumuskan kebijakan tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. "Itu kami sedang membahas di internal kementerian," kata Fajar di Banten, Senin (1/6/2026), dikutip dari *Kompas.com*.

Fajar mengatakan, penerapan pelajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah bukan hal baru. Ia menjelaskan bahwa saat ini mata pelajaran bahasa asing tersebut telah diajarkan di banyak sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai mata pelajaran pilihan.

"Kami di kementerian sudah ada Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur soal pengajaran bahasa di sekolah, yaitu Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Jadi, sudah ada koridornya," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung rencana Presiden Prabowo menerapkan mata pelajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Menurut dia, penambahan mata pelajaran Bahasa Prancis bermanfaat bagi siswa.

"Meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global," ujar Hetifah saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Senin (1/6/2026).

Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, kebijakan pendidikan tidak bisa disusun berdasarkan momentum diplomatik semata tanpa kajian kebutuhan yang jelas. Menurut dia, instruksi Presiden ini tidak jelas dan tidak terencana.

"Terkesan terburu-buru, tanpa perencanaan matang, belum menjadi kebutuhan prioritas, dan dirasa lebih kepada basa-basi diplomatik belaka," cetus Satriwan, Sabtu (30/5/2026).

Untuk mengetahui pandangan Hetifah Sjaifudian dan Satriwan Salim mengenai instruksi Presiden Prabowo agar Bahasa Prancis diajarkan di seluruh sekolah di Indonesia, berikut wawancaranya.

HETIFAH SJAIFUDIAN, Ketua Komisi X DPR

Jadi Bekal Hadapi Persaingan Global



“ Pastinya yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan dan kompetensi guru.

Bagaimana pandangan Anda mengenai instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah mengajarkan Bahasa Prancis?

Kami tentu mendukung upaya Pemerintah meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global.

Untuk pelaksanaannya, apakah tidak memberatkan?

Tentu, terkait arahan Presiden untuk memperluas pembelajaran Bahasa Prancis, perlu ada kejelasan implementasi di sekolah.

Kejelasan seperti apa?

Penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru dijalankan tahun ini.

Lalu, apa yang mesti diperhatikan oleh Pemerintah jika rencana ini akan dilaksanakan?

Pastinya yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan dan kompetensi guru. Jangan sampai sekolah dibebani kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai serta sarana pembelajaran yang cukup.

Ada saran kepada Pemerintah agar rencana ini efektif?

Pembelajaran bahasa asing harus dibuat menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pendekatan melalui percakapan, permainan, musik, film, budaya, dan teknologi digital akan lebih efektif dibandingkan metode yang terlalu menekankan hafalan dan teori.

Anda yakin instruksi Presiden ini akan berjalan baik dan bermanfaat bagi peserta didik?

Kami berpandangan bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan, melainkan oleh kualitas pengajaran, kesiapan guru, dan minat siswa. Karena itu, Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan berjalan bertahap, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. ■ NNM

SATRIWAN SALIM, Koordinator Nasional P2G

Ngelola Pendidikan Tak Sebercanda Ini



“ Jangankan merekrut 480 ribu guru baru Bahasa Portugis dan Bahasa Prancis, untuk memenuhi kebutuhan dasar sebanyak 374 ribu guru saja, Pemerintah gagal merealisasikannya.

Bagaimana pandangan Anda mengenai instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia mengajarkan Bahasa Prancis?

Setelah Bahasa Portugis dan Bahasa Prancis, nanti kalau Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, apakah akan memasukkan Bahasa Jepang ke kurikulum? Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan Bahasa Mandarin sebagai pelajaran wajib? Begitu juga sepulang dari Belanda, lantas Presiden akan mewajibkan pelajaran Bahasa Belanda. Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini.

Apa alasan Anda menolaknya?

Ada beberapa alasan kami menolak. Pertama, instruksi Presiden Prabowo setahun lalu agar sekolah mengajarkan Bahasa Portugis kepada murid saja belum terwujud hingga hari ini, kini ditambah lagi Bahasa Prancis. Lagi pula, memasukkan kurikulum Bahasa Prancis dan Bahasa Portugis di sekolah tidak menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN yang sudah ditetapkan.

Alasan lainnya?

Mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di semua jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/sederajat, akan menambah beban kurikulum bagi murid, mengingat struktur kurikulum nasional masih relatif padat.

Bagaimana dengan sumber daya pengajarnya?

Saat ini Indonesia mengalami kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah negeri sebanyak 374 ribu orang (data Kemendikdasmen). Dengan memasukkan pelajaran Bahasa Portugis dan Bahasa Prancis mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/sederajat, maka kekurangan guru nasional akan bertambah. ■ NNM